

**ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI  
YANG PROFESIONAL DAN BERSIH**  
(*Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*)

Oleh  
*Militya C. Maindoka*<sup>1</sup>  
*Markus Kaunang*<sup>2</sup>  
*T.A.M.R. Gosal*<sup>3</sup>

**Abstrak**

Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdikan pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdian dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi di kalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan (*The use of power*). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat. Harus ditanggapi segala keinginan-keinginan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini penguasa harus dapat menstimulasi partisipasi. Memang untuk dapat menstimulasi partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam. Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah adalah penting. Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah.

Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang profesional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa guna terwujudnya Birokrasi yang profesional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa masih banyak sikap, perilaku aparat yang perlu diperbaiki dapat dikatakan di Kecamatan Maesaan etika pemerintahan belum berjalan sebagaimana seharusnya.

***Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

## PENDAHULUAN

Etika menjadi landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan. Ketika masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, mereka lalu menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut, karena etika pemerintahan selalu menjadi isu yang senantiasa membutuhkan perhatian yang serius. Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Memahami pentingnya etika pemerintahan tidaklah semata-mata mengondoktarinasikan apa yang boleh dan tidak dikerjakan (baik-buruk; benar-salah) oleh aparat pemerintahan, tetapi lebih dari itu adalah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme agar tindakan dan perilakunya mencerminkan *ethical reflection* yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai

etika. Etika pemerintahan yang dijalankan birokrasi pemerintahan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di kecamatan bahkan ditingkat pedesaan.

Kantor kecamatan Maesaan, merupakan salah satu lembaga birokrasi pemerintahan, dimana kecamatan merupakan birokrasi pemerintahan yang menjadi perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut Camat. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh perangkat pemerintah kecamatan sebagaimana pada struktur organisasi tata kerja pemerintah Kecamatan Maesaan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi dalam mewujudkan birokrasi kecamatan yang profesional dan bersih dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari bahwa aparatur pemerintah terutama yang bertugas di Kecamatan Maesaan di duga masih memiliki kualitas yang belum baik dalam melaksanakan tugasnya. Rendahnya kualitas aparat pemerintah (Birokrat) ini diperoleh berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang pernah meminta untuk mendapatkan pelayanan di kantor kecamatan, hal ini pula dapat mempengaruhi kualitas kerjanya dan berdampak pada: kurang patuhnya aparat birokrasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan pengabdian tanggung jawab, memiliki jiwa dedikasi yang rendah, kurang inisiatif, penundaan dalam berbagai tugas yang diberikan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Bertolak dari kenyataan di atas dapat pula mempengaruhi pada pelaksanaan Birokrasi pemerintahan yakni mempengaruhi proses pencapaian tujuan, proses pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan. Mengingat Birokrasi adalah merupakan kultur universal yang ada dimana saja, maka pelaksanaan Birokrasi pemerintahan di Kecamatan Maesaan perlu ditingkatkan agar dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan berjalan dengan baik.

Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan Birokrasi pemerintahan yang sudah disebutkan di atas maka penting adanya etika pemerintahan dalam pelaksanaan kerja aparat birokrasi yang bersih dan profesional di Kantor Kecamatan Maesaan, sebab tanpa adanya etika pemerintahan maka pelaksanaan tugas kerjabirokrasi kecamatan akan mengalami hambatan, etika pemerintahan yang dimaksudkan disini berupa penerapan perangkat peraturan perundang undangan yang berlaku agar perilaku birokrat taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan seperti, disiplin bagi pegawai/aparatur pemerintah, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas yang dianggap dominan mempengaruhi pelaksanaan birokrasi pemerintahan khususnya di Kecamatan Maesaan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang di kemukakan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional di Kecamatan Maesaan?

Untuk mengetahui etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional di kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Etika Pemerintahan**

Mahmoedin, As, (1994:25) membagi istilah etika dalam beberapa definisi, yaitu :

- Merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak.
- Tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia.
- Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
- Merupakan ilmu mengenai watak manusia yang ideal. Kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak.
- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

- Pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang diterima atau diakui, sehubungan dengan kegiatan manusia dari golongan tertentu. Ilmu mengenai kewajiban.
- Dasar-dasar moral seseorang.

Dalam Encyclopedi Britanica, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral (Zubair 1990:16).

Dari berbagai konsep tentang etika, dapat diklasifikasikan 3 jenis konsep yaitu:

- Yang menekankan pada aspek historis: Dimana etika dipandang sebagai cabang filsafat yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia.
- Yang menerangkan secara Deskriptif : Dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan manusia bersama. Konsep demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keanekaragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
- Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang normatif dan bercorak kefilosofan; dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Atas dasar konsep terakhir ini etika digolongkan sebagai pembicaraan yang bersifat informative direksif dan refleksif. (Zubair 1990:17).

Etika pemerintahan adalah bagian dari etika pada umumnya, sedangkan etika itu laus sekali. Unsur-unsur pemerintahan yang perlu diperhatikan didalam etika pemerintahan ialah harus mempunyai adjustment dan unlimited/penyesuaian segala sesuatu yang tidak ada batasnya (Widjaya,

## Konsep Birokrasi Pemerintahan

Pemakaian istilah Birokrasi dewasa ini sangat populer bukan saja dikalangan elite tetapi di lingkungan kaum awam sering mempergunakan walaupun tidak pada proporsi yang sebenarnya. Untuk mendapat kejelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Birokrasi, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pendapat dari para ahli:

Drs. Soewarno Handyaningrat (1982:16), Birokrasi (bureaucracy) berasal dari kata biro (bureau) yang berarti meja (desk) dan cracy (crator) artinya pemerintahan melalui meja, jika dilihat dari pengertian di atas maka Birokrasi adalah suatu sistem kewenangan kepegawaian yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-programnya.

Bintoro Tjokroamidjoyo (1983:71), mengatakan bahwa Birokrasi adalah tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk pelaksanaan pelbagai tugas tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparat pemerintah.

W.J.S. Poerwadarminta (1976:144) memberikan pengertian Birokrasi sebagai berikut:

1. Pemerintah yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat.
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.
3. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat menurut aturan, banyak liku likunya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam pendekatan kualitatif. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi pemerintah kecamatan yang bersih dan professional, dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Mertins, dalam Krisyanto (2001:24-25) terciptanya integritas profesional para aparat penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- Equality; Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang

secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya. Bagi mereka yang memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur.

- Equity; Perlakuan yang sama pada masyarakat tidak cukup. Maka selain itu diperlukan perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang kadang-kadang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama, dan kadang-kadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tapi tidak sama kepada orang tertentu.
- Loyalty; Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut berkaitan satu sama lain. Dan tidak ada kesetiaan yang diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.
- Responsibility; Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari sindrom "saya sekedar melaksanakan perintah atasan.

Informan yang diteliti digolongkan kedalam dua golongan yakni,

- (1) Informan kunci yakni orang yang mengetahui dengan jelas kondisi penelitian dan mampu memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu:
  - Camat 1 orang
- (2) Informan biasa, yakni orang yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Informan biasa yang diambil untuk masalah penelitian yakni:
  - Sekretaris Kecamatan 1 orang
  - Staf Kecamatan 3 orang
  - Masyarakat 5 orang

Pencarian data dalam menyusun penulisan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: Observasi, Wawancara, Studi Literatur.

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Menurut Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman (Sugiyono, 2007:246), mengatakan bahwa "Aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Etika pemerintah aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan Maesaan, seperti yang telah di uraikan dalam bagian latar belakang penelitian ini, bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan, oleh sebab itu etika aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Etika aparatur pemerintah dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja birokrasi pemerintahan kecamatan yang bersih serta professional, oleh sebab itu bagian ini akan membahas mengenai etika pemerintahan aparatur dalam pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Maesaan, serta membahas mengenai upaya pemerintah meningkatkan etika aparatur di Kantor Kecamatan Maesaan, sehingga dapat terwujud birokrasi pemerintahan kecamatan yang bersih dan professional.

Dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi dan kualitas serta profesionalisme yang tinggi sadar akan tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan disegala bidang di era globalisasi dan di era otonomi daerah maka dituntut akan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan segala tugas pemerintahan agar implementasi otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

Banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah, kebijakan secara umum dalam usaha pembangunan dilaksanakan melalui aparatnya, khususnya melalui pembangunan sumber daya aparatur itu sendiri, dimana aparatur pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai administrator pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat gambaran pelaksanaan

tugas aparat pemerintah di kantor Kecamatan Maesaan dapat dilihat dari perilaku aparat pemerintah yang merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak.

Untuk mengetahui perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas berikut ini hasil wawancara dengan informan Camat Maesaan yang mengatakan bahwa:

*“para pegawai (staf) yang ada di kantor Kecamatan Maesaan pada umumnya telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik seperti dalam halketaatan, disiplin dan berdedikasi, walaupun dalam beberapa kasus ada ditemui perilaku para staf yang sering terlambat masuk kantor, ada juga yang suka menunda-nunda pekerjaan dengan berbagai alasan, bisanya apabila didapati aparat yang seperti itu saya sebagai camat langsung memberikan pembinaan kepada oknum tersebut”.*

Berdasarkan informasi tersebut kenyataan yang ada mengindikasikan bahwa kurang kontrol dalam internal aparatur yang ada di kecamatan maesaan sehingga hal-hal yang menjadi keluhan di masyarakat tidak diketahui secara detail oleh pimpinan yang ada di Kecamatan Maesaan.

Aparatur pemerintah tentu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan Pemerintahan, dalam efektifitas dan efisiensi organisasi pemerintahan daerah. Proses penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat berlangsung dengan efisien dan efektif bila didukung oleh manusia-manusia pelaksananya yang memiliki kualitas, terutama pada aparat pemerintah sebagai pelaksana

utamanya, yang beretika dan bermoral dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu upaya-upaya pengembangan kualitas aparatur pemerintah harus terus dan semakin digalakkan hingga sekarang ini, pembangunan aparatur pemerintah umumnya terus dilakukan dan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparat khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam ilmu pemerintahan, peraturan yang menjadi pedoman sikap dan landasan bertindak serta berperilaku bagi aparatur Negara atau apratur pemerintahan disebut dengan etika pemerintahan. Hingga sekarang ini telah banyak ditetapkan peraturan-peraturan yang mengatur dan menjadi pedoman sikap dan perilaku aparatur pemerintah, misalnya peraturan mengenai etika jabatan, peraturan mengenai disiplin dan berbagai peraturan kedinasan lainnya.

Salah satu maksud atau tujuan ditetapkannya etika pemerintahan ialah untuk menciptakan atau mengembangkan kualitas aparatur Negara atau aparatur pemerintah, terutama menyangkut sikap dan perilakunya sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kenyataannya, apa yang diharapkan belum dapat terwujud secara maksimal. Dengan kata lain meskipun telah ditetapkan dan terus disempurnakan etika pemerintahan itu serta dengan berbagai kebijaksanaannya, kualitas sikap dan perilaku aparat pemerintah yang melanggar peraturan, baik dalam kedinasan seperti penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya, setidak-tidaknya dapat dijadikan alasan untuk menyatakan masih rendahnya sikap dan perilaku aparat pemerintah yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Hasil penelitian, sehubungan dengan sikap dan perilaku aparatur di Kecamatan Maesaan yang ditinjau dari aspek etika pemerintahan dengan menggunakan beberapa kajian sebagai tolak ukurnya, yaitu: Equality;

perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan, Equity; perlakuan yang adil atas pelayanan yang diberikan, Loyalty; kesetiaan pada aturan, hukum dan atasan serta rekan kerja, Responsibility; tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, Kualitas moral pribadi; mencakup sikap kejujuran, keberanian dan optimisme dalam bekerja.

Dapat diuraikan sesuai dengan hasil berikut ini:

### **1. Equality**

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang aparat pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada semua pihak tanpa memandang status sosial, afiliasi politik atau bahkan hubungan kekerabatan. Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan selalu dituntut kepada aparat pemerintah untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik pada masyarakat, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan aparat itu sendiri. Pada intinya semua masyarakat dari kalangan manapun berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah.

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang pernah melakukan urusan administrasi di Kecamatan Maesaan mengatakan:

*“sesuai dengan pengalaman saya, aparat yang ada di Kecamatan Maesaan memberikan perlakuan yang sama kepada pegawai yang membutuhkan pelayanan sehubungan dengan pengurusan administrasi di kantor Kecamatan tanpa memandang status sosial, hubungan kekrabatan dan lain-lain, meskipun ada sebagian kecil yang masih dipengaruhi oleh pandangan bahwa hubungan keluarga adalah yang utama, dengan kata lain, mereka dalam memberikan pelayanan lebih mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dari pada kepentingan orang lain”.*

### **2. Equity**

Equity atau perlakuan yang adil dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah sangatlah penting, karena hal ini akan menimbulkan efek negatif dalam suatu lembaga pemerintahan itu sendiri. Untuk masyarakat yang pluralistic seperti Indonesia

kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dalam memberikan pelayanan dan kadang-kadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tapi tidak sama kepada orang-orang tertentu.

Salah satu contoh konkritnya dalam pengurusan berkaskenaikan pangkat, pegawai berhak atas perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil, dengan persyaratan, mungkin biaya-biaya administrasi yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan urusan-urusan lain yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil dalam pelayanan yang kerap kali kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hasil wawancara dengan pegawai yang ada di Kecamatan Maesaan, mendapatkan gambaran bahwa sebagian besar aparatur di Kecamatan Maesaan dalam menjalankan tugasnya selama ini cukup mampu memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat. Meskipun demikian masih ada aparatur yang masih berperilaku tidak adil dalam memberikan pelayanan.

### 3. Loyalty

Setiap aparatur pemerintah dituntut loyalitasnya terhadap aturan yang berlaku, terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja. Berbagai jenis loyalitas atau kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis loyalitas atau kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Sebagai contoh loyalitas terhadap aturan yang berlaku, misalnya aparatur pemerintah harus menaati semua jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus loyal kepada hukum dan konstitusi yaitu bersikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil yang cukup positif terhadap tingkat loyalitas aparatur di kantor Kecamatan Maesaan terhadap hukum dan konstitusi. Camat Maesaan mengatakan bahwa:

*“aparatur berperilaku setia dan loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945. Didalam melaksanakan tugas, selalu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan pemerintah Indonesia, meskipun demikian masih ada aparatur yang menunjukkan tingkat*

*loyalitas yang kurang terhadap hukum dan konstitusi”.*

Selain itu dari hasil penelitian mengenai tingkat loyalitas aparatur terhadap aturan kedinasan yang berlaku, terutama kedisiplinan terhadap jam kerja. Dari hasil penelitian ternyata aparatur yang loyal terhadap peraturan kedinasan berbanding. Loyalitas terhadap peraturan kedinasan lebih banyak berkaitan langsung dengan kedisiplinan kerja seorang aparatur, baik itu menyangkut kedisiplinan masuk kantor, keluar kantor, berpakaian dinas dan lain sebagainya, oleh sebab itu meskipun terdapat lebih banyak aparatur yang disiplin dibanding dengan yang tidak disiplin, hal ini menyangkut loyalitas aparatur pemerintah terhadap peraturan-peraturan kedinasan harus disikapi lebih lanjut dan harus lebih mendapat perhatian terutama oleh Camat sebagai pimpinan di kantor Kecamatan Maesaan, karena ternyata masih cukup banyak aparatur yang kurang taat terhadap peraturan-peraturan kedinasan yang ada.

Selain kedua hal yang telah disebutkan diatas, tingkat loyalitas terhadap atasan perlu mendapat perhatian. Atasan sebagai pimpinan haruslah ditunjang oleh loyalitas dari bawahannya sehingga penyelenggara tugas dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama yang baik pula antara atasan dan bawahan. Loyalitas terhadap atasan yang dimaksud disini bukan rasa takut yang berlebihan, sehingga apapun yang diperintahkan atasan meskipun sudah diluar jalur yang harus dilaksanakan. Loyalitas terhadap atasan disini adalah kesetiaan terhadap atasan didalam koridor dan ruang lingkup pekerjaan. Dimana dalam hal ini seorang atasan harus dihormati, hormati dan ditaati apabila menyangkut keberhasilan pekerjaan.

### 4. Responsibility

Dalam menjalankan tugasnya, seorang aparatur harus menghindarkan diri dari anggapan: *“saya sekedar melaksanakan perintah atasan sebagai wujud rasa tanggung jawabnya atas pekerjaan”*. Jadi dalam hal ini ada rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Karena apabila dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan seorang aparatur hanya

berprinsip sekedar menjalankan suatu perintah atasan, maka bukan tidak mungkin pekerjaan itu tidak akan sempurna hasilnya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Maesaan ditemukan informasi bahwa:

*“aparatur pemerintah di kantor Kecamatan Maesaan sebagian besar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun dengan perbandingan yang kecil dengan aparat yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, masih sangat diperlukan dari aparatur pemerintah yang ada untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar penyelenggaraan tugas-tugas pokok dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat pelayanan yang prima.*

Mempertahankan dan menjalankan semua prinsip-prinsip etika pemerintahan diatas tentunya sangat sulit, tetapi apabila pemerintah tersebut tidak mampu lagi menjalankannya malah dinilai sebagai aparatur yang tidak memiliki integritas profesional. Oleh karena itu, selain komponen-komponen etika pemerintah yang telah dikemukakan diatas, penguatan etika pemerintahan juga perlu diarahkan pada tiga inti kualitas moral pribadi aparatur pemerintah itu sendiri, yaitu : Optimisme, Keberanian, dan Kejujuran.

Dari hasil wawancara didapatkan informasi, dengan mengukur tingkat optimis aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas, maka peneliti memperoleh hasil yang sangat positif. Dimana perbandingan antara aparatur pemerintah yang menjalankan tugas yang optimis mempunyai perbandingan yang cukup signifikan dengan aparatur pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan perilaku yang kurang optimis.

Dari hasil wawancarapeneliti mendapatkan hasil bahwa sebagian besar aparatur pemerintah dinilai berperilaku kurang jujur dalam menjalankan tugasnya, walaupun demikian masih ada aparatur pemerintah yang dinilai berperilaku jujur dalam menjalankan tugasnya.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya,

ditemukan beberapa informasi mengenai etika aparatur pemerintah kecamatan maesaan, pada sisi aparatur mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan hal yang sewajarnya dengan sebaik-baiknya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada, dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, namun pada sisi lain informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan informan masyarakat sangat bertolak belakang dengan informasi sebelumnya, dimana masyarakat belum merasakan adanya sikap perilaku dari aparatur yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada saat kenyataan yang diinginkan masyarakat jauh dari harapan, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi pada masyarakat yang telah memberikan informasinya sesuai dengan penentuan informan mengharapkan agar para aparatur Birokrasi bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan, sementara yang kenyataan yang terjadi aparatur sama sekali atau kurang bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang diharapkan tersebut adalah Etika yang perlu diperhatikan oleh aparat Birokrasi khususnya yang ada di Kecamatan Maesaan.

Ada beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang bersih, tanggap, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, yaitu:

1. Masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama

lain. Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabat birokrasi seringkali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah-masalah yang ada dalam "grey area" seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi *policy guidance* kepada para pejabat birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

2. Keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi. Walaupun pengembangan etika birokrasi sangat penting bagi pengembangan birokrasi namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam pengembangan etika, seperti terefleksikan dalam etika kedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para profesional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika birokrasi ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan

kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika Birokrasi menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat birokrasi itu sendiri yang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan. Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

Telah disepakati bahwa moral merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia untuk mengarah kepada perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh sebab itu, unsur filosofis yang menentukan rangsangan-rangsangan psikologis tersebut banyak kaitannya dengan nilai (value) yang dianut oleh seseorang. Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai sebagai pendorong utama bagi tindakan manusia dari pelbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas tindakan manusia, Moore membedakan enam macam nilai yaitu: membedakan antara nilai primer, sekunder, dan tertier.

Apabila seseorang sangat mencintai perdamaian dan punya kecenderungan untuk bertindak kearah itu, hal tersebut adalah suatu nilai primer. Akan tetapi, jika dia punya harapan, misalnya dengan menolak untuk menjadi tentara, ia memiliki perdamaian dengan keyakinan bahwa tidak akan ada perang, atau sekadar punya rasa puas bila perdamaian itu terwujud, sehingga dia hanya memiliki nilai sekunder atau bahkan tertier. Rasa puas atau kesenangan (pleasure) dalam hal ini merupakan penilaian yang bersifat sekunder.

Dalam masalah yang sedang diangkat mengenai penandatanganan pakta integritas di kalangan aparatur pemerintah dapat

dimasukkan dalam nilai nomor ke-4 yaitu Perbedaan dapat digariskan antara nilai-nilai negative dan positif. Suatu nilai negative terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negative, kebalikan dari nilai negatif adalah nilai positif, sebagai contoh kita bias melihatnya dari moralitas yang punya ciri khas adanya larangan dan anjuran. Penandatanganan pakta integritas adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi. Korupsi menurut pengertian harfiah adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, ia punya konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya.

Kegiatan korupsi dapat dikatakan sebagai kegiatan negatif apabila tujuan korupsi adalah hanya untuk kepentingan pribadi orang tetapi bisa dikatakan positif apabila tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Apabila seorang pejabat misalnya menggunakan inventaris atau barang milik dinas untuk kepentingan pribadi hal tersebut dapat juga disebut korupsi karena inventaris dinas seperti misalnya mobil dinas seharusnya hanya dipakai untuk kepentingan dinas saja tidak untuk digunakan di luar dinas apabila kalau bahan bakar yang digunakan juga diambil dari dana kedinasan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, pada Kantor Kecamatan Maesaan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah, dengan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji dalam memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan, sehingga belum dapat mewujudkan birokrasi pemerintah kecamatan maesaan yang bersih dan profesional.
2. Equality, equity, loyalty, responsibility, maupun sikap moral aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan Maesaan masih

tergolong rendah, salah satu penyebab adalah kualitas moral dari masing-masing personil aparat itu sendiri, disamping faktor kesejahteraan yang belum terlalu mendukung untuk memenuhi kebutuhan/kesejahteraan pegawai, yang berimbas kepada kinerja aparatur itu sendiri.

3. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur Pemerintah di Kecamatan Maesaan telah memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, meskipun masih ada beberapa yang masih kurang memahami dan tidak menerapkan etika pemerintahan tersebut.

### **Saran**

Dengan mengacu pada kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan melihat kenyataan semakin rendahnya moral aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Maesaan, maka revitalisasi moral harus dimulai dari sisi individual aparatur pemerintah itu sendiri. Dengan moral dan perilaku yang etis yang dimulai dari perilaku aparatur secara individu, antara lain dengan melakukan pendidikan pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas moral etika aparat.
2. Perlu ditingkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan tanggungjawab dan kinerja aparatur, sehingga indicator equality, equity, loyalty, responsibility, maupun sikap moral aparatur berubah dengan signifikan.
3. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah etika pemerintahan dan di dalam pengembangannya tidak semata-mata mengondoktarnasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan seseorang aparatur pemerintah, tetapi lebih dari pada itu ialah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme yang bermanfaat efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas aparatur.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Austern, David; Steinberg, Sheldon, 1998, *government ethics and manager (penyelewengan aparat*

- pemerintah), Remaja Rosda Karya, Bandung
- Djohan, Djohermansyah, 1990, *Problematik Pemerintahandan Politik Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gitosudarmo, 1997, *Perilaku Organisasi*, BPFE, Yogyakarta
- Gordon, Thomas, 1986, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta
- Irawan, Soeharto, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1994, *Etika Bisnis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Krisyanto, Eddy, 2001, *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Radar Jaya Offset , Jakarta.
- Mahmoedin, AS, 1994, *Etika Bisnis*, Putaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pamudji, S, MPA, 1982, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahmad, J, 1990, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Robbins, 1996, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Syaffie, Kencana Ibnu, 1994, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara Jakarta.
- ....., 1994, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Widya Jaya, A.W, 1991, *Etika Pemerintahan* , Bumi Aksara, Jakarta.
- Zubair, Achmad, 1990, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers, Jakarta
- Albrow Martin, 1989, *Birokrasi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Benveniste Guy, 1991, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Handyaningrat Soewarno, 1983, *Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo Bintoro, 1976, *Pengantar Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.